

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 9, No.1, Juni 2023

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 9, No. 1 Juni 2023

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.,M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
- Sekretaris Redaksi** : Nursaripati Risca, S.Pd
- Dewan Redaksi** : Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.  
Zakiah, SE., Ak  
Surya Rahmah Labetubun, S.Kom
- Redaktur Ahli** : Paisal, S.H.  
Amir Alboneh, S.Ag  
Muhammad Afhan, SE  
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si  
Muhammad Irfan Syuhudi, S.Sos., M.Si
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.  
Dr. H. Norman Said, M.Ag  
Dr. Abdul Muhaimin, M.Ed  
Dr. H. Barsihan Noor  
Dr. Wahyudin Halim  
Sitti Arafah, S.Ag., M.A.
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos  
Husnul, S.Pd  
Burhanuddin  
Bohari
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222  
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982  
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun terbit, dan halaman, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

## **DAFTAR ISI**

**AHMAD BASO**

**SATU ABAD NAHDLATUL ULAMA, SATU ABAD PENGHADIRAN WALI  
SONGO: MELACAK AKAR-AKAR PEMIKIRAN KEISLAMAN-KEBANGSAAN  
NAHDLATUL ULAMA**

Halaman: 1 -18

**ABD. KADIR AHMAD**

**AWAL KEBERADAAN NU SULSEL: TRADISI *APPALEMBA KITTAK* DAN PROFIL  
PENGURUS MAJELIS KONSUL NU**

Halaman: 19 - 32

**SYAMSURIJAL**

**MENGINTIP NAHDLATUL ULAMA (NU) DARI TIMUR:  
KHITTAH NU DALAM PANDANGAN DAN PENGALAMAN NAHDLIYIN  
DI SULAWESI SELATAN**

Halaman: 33 - 53

**MUHAMMAD ALWI HS**

**KOMBINASI PERAN ULAMA-UMARA DALAM DAKWAH AGH. SANUSI BACO  
DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BERBASIS NAHDLATUL  
ULAMA DI INDONESIA TIMUR**

Halaman: 54 - 70

**WENDI PURWANTO**

**PENAFSIRAN KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL  
ULAMA: ABDUL SOMAD, BAHAUDDIN NURSALIM DAN IDRUS RAMLI  
DALAM TAFSIR VERBAL DI MEDIA SOSIAL**

Halaman: 71 - 88

**SABARA**

**PERAN NU SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN DI PAPUA**

Halaman: 89 - 106

**MURSALAT**

**NAHDLATUL ULAMA (NU) FEMALE FIGURES IN THE MODERN ERA:  
YENNY WAHID'S GAIT AS A WOMAN WARRIOR IN HUMANITY AND PEACE**

Halaman: 107 - 121

**MUHAMMAD SURYADI**

**NAHDLATUL ULAMA DAN ISU LINGKUNGAN  
(KOMITMEN NU MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGI DAN  
SUMBER DAYA ALAM)**

Halaman: 122 - 134

**MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI**  
**MENEMUKAN KEBERAGAMAN AGAMA MELALUI PENGALAMAN**  
**BERINTERAKSI DENGAN ANAK-ANAK MUDA NAHDLIYIN**  
**DI MAKASSAR**

Halaman: 135 - 149

**MUH. SUBAIR**  
**RESISTENSI WARGA NAHDLATUL ULAMA (NU)**  
**TERHADAP WAHABI TAKFIRI**

Halaman: 150 - 167

**SISWOYO ARIS MUNANDAR**  
**PERAN DAN KONTRIBUSI K.H. YAHYA CHOLIL STAQUF DALAM**  
**PEMBANGUNAN ISLAM MODERAT DI INDONESIA DAN DI DUNIA**  
**INTERNASIONAL**

Halaman: 168 - 185

**ANI KURNIAWATI**  
**KIAI HASYIM ASY'ARI : PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH BELANDA**

Halaman: 186 - 191

**IMAM GHOZALI, IMAM HAKIM DAN NAIF ADNAN**  
**KONSEP *SUMELEH* ABDURRAHMAN WAHID DALAM MENGEMBANGKAN**  
**NILAI-NILAI KE-NU-AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAJEMUKAN**  
**MASYARAKAT**

Halaman: 192 - 203

**ISRAPIL DAN SYAMSURIAH**  
**PEMETAAN MASJID DI KOTA MAKASSAR :**  
**POTENSI DAN PELUANG LTM NU DALAM MEMAKMURKAN**  
**MASJID DI MAKASSAR**

Halaman: 204 – 213

**HENRI HERMAWAN ADINUGRAHA**  
**NAHDLATUL ULAMA UNIVERSITY IN INDONESIA: ITS ROLE AND CONCRETE**  
**CONTRIBUTION TOWARD CURRENT EDUCATION**

Halaman: 214 - 233

**MENGINTIP NAHDLATUL ULAMA (NU) DARI TIMUR:  
KHITTAH NU DALAM PANDANGAN DAN PENGALAMAN NAHDLIYIN  
DI SULAWESI SELATAN**

*Syamsurijal*

Peneliti Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban BRIN

Email: [syam017@brin.go.id](mailto:syam017@brin.go.id)

**Abstrak**

Sejak Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan dirinya kembali ke Khittah 1926 pada muktamar ke 27 di Situbondo 1984, perdebatan tentang hal itu terus muncul. Berbagai diskusi dan tulisan mempersoalkan Khittah NU; apa makna khittah itu bagi nahdliyin; dan yang paling keras adalah perdebatan soal kembali ke khittah itu apakah berarti NU tidak boleh atau masih boleh terlibat lagi dalam politik ‘praktis’. Peneliti luar negeri, dalam negeri maupun dari kalangan nahdliyin sendiri terlibat dalam penulisan mengenai perdebatan tersebut. Dalam peringatan seabad NU, perdebatan ‘Kembali ke Khittah’ menghangat lagi. Hal ini dipicu posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan NU. Apakah dengan adanya PKB itu berarti NU diharuskan berpolitik dengan menjadikan PKB sebagai kendaraannya. Atau tetap berposisi non-partisan sebagai wujud dari konsistensi ‘Kembali ke Khittah’. Sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengambil jarak dengan PKB dianggap sebagai pernyataan yang terang benderang, bahwa NU tidak berpolitik. Sikap ini tentu juga dikritik oleh kalangan nahdliyin yang menginginkan NU tetap terlibat dalam politik. Di tengah perdebatan itu, hampir tidak ada yang memotret bagaimana pandangan kaum nahdliyin sendiri, khususnya yang berasal dari luar Jawa. Apakah pandangan mereka tentang kembali ke khittah sama dengan yang muncul dalam perdebatan di kalangan elite PBNU-PKB dan intelektual? Bagaimana nahdliyin luar Jawa ini memahami khittah NU, apa yang dimaksud kembali ke khittah oleh mereka dan bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari? Artikel yang berbasis pengalaman penulis sebagai salah satu nahdliyyin di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menguraikan hal tersebut. Fokus tulisan pada pandangan dan pengalaman nahdliyin di Sulsel dengan menguraikan dinamika dan pergumulan komunitas NU dalam berbagai isu yang diusung oleh organisasi ini, terutama menyangkut ‘kembali ke khittah’.

**Kata Kunci:** *khittah, kembali ke khittah, politik NU, nahdliyin Sul-Sel*

**PENDAHULUAN**

Dalam muktamar ke-27 pada 1984 di Situbondo, NU melahirkan dua keputusan penting, yaitu menerima Pancasila sebagai asas dalam berorganisasi dan kembali ke Khittah 1926. Dua keputusan itu menarik perhatian banyak kalangan sebab lahir dalam momentum yang tepat, yakni ketika posisi politik NU di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang mengalami titik krusial dan di saat yang sama Pancasila sebagai asas tunggal tengah menjadi tema perdebatan serius.

Akan hal penerimaan NU terhadap asas Pancasila, meski menimbulkan tanda

tanya dan dianggap oleh orang di luar NU sebagai politik akomodasi dari NU, tetapi relatif tidak menimbulkan gejolak dalam tubuh NU sendiri. Para ulama yang menerima Pancasila itu diyakini telah mempertimbangkannya dari sudut agama. Walaupun ada kecenderungan akomodasi yang terkesan oportunistis, bagi kalangan nahdliyin hal itu lebih tepat disebut keluwesan dan kemampuan adaptasi yang memang menjadi ciri NU.

Agama Islam sendiri dalam sejarahnya, seperti diakui oleh Montgomery Watt (1968), memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, sehingga

bisa dibenarkan jika NU sendiri menyesuaikan pandangan keagamaan mereka dengan perkembangan yang terjadi. Selain itu, pertimbangan yang menjadi dasarnya, baik atas dasar fitrah, konsep ketuhanan maupun atas dasar sejarah, bisa diterima di kalangan NU. Yang lebih penting lagi, di kalangan nahdliyin menyadari bahwa penerimaan asas Pancasila tidaklah dimaksudkan menggantikan posisi Islam sebagai agama. Keputusan Musyawarah Nasional pada 1983 yang melahirkan Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam, secara jelas menunjukkan posisi NU terhadap hubungan Islam dan Pancasila. Bahwa penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal tidak berarti bahwa ia dapat menggantikan posisi agama, karena memang Pancasila bukanlah agama (Shidiq 1980; Jamil, Joebagjo and Djono, 2018).

Jika dalam hal penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila tidak menjadi persoalan yang pelik di tubuh organisasi tersebut, maka tidak demikian halnya dengan keputusan kembali ke Khittah 1926. Untuk keputusan ini, tidak hanya menarik berbagai kalangan, termasuk peneliti asing, untuk menelaahnya lebih dalam, tetapi di kalangan nahdliyin sendiri terjadi perdebatan serius. Persoalannya bukan pada Khittah NU-nya, karena hal itu merupakan prinsip dasar dari organisasi tersebut. Khittah NU menjadi landasan bagi organisasi NU dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam membentuk pandangan dan kebijakan organisasi. Rumusan landasan berfikir, bertindak dan berjuang dari warga NU terdapat dalam Statuta NU 1926 yang intinya organisasi NU didirikan dengan tujuan keagamaan dan sosial kemasyarakatan (Ridwan 2020c). Dalam muktamar 1984 Khittah NU diformulasikan kembali dengan menegaskan NU sebagai *jam'iyah diniyah-ijtima'iyah*. Formulasi ini mencakup pengertian Khittah NU sebagai dasar-dasar paham keagamaan NU, sikap kemasyarakatan NU, perilaku yang dibentuk oleh dasar-dasar keagamaan dan

sikap kemasyarakatan NU, ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan NU, fungsi ulama di dalam jam'iyah, dan hubungan NU dengan bangsa ("Khittah NU" 2012).

Adapun yang memantik perdebatan di kalangan nahdliyin adalah soal apakah Kembali ke Khittah 1926 tersebut adalah penegasan bahwa NU secara organisatoris tidak terikat dan terkait dengan organisasi atau partai politik, serta organisasi kemasyarakatan mana pun. Melalui Mukttamar 1984 yang menetapkan NU Kembali ke Khittah dianggap sebagai momentum dari sikap NU yang tidak lagi ingin berkecimpung dalam dunia politik. Mukttamar 1984 tersebut seakan memenangkan kubu yang selama ini memang tidak menghendaki lagi NU terlibat dalam partai politik tertentu.

Perlu dicatat, sejak Mukttamar NU ke-22 di Jakarta pada 13-18 Desember 1959, telah muncul suara Kembali ke Khittah. Selanjutnya, suara-suara yang menginginkan kembali ke Khittah sejak 1960 terus digaungkan, khususnya melalui Warta Syuriah. Pada muktamar-muktamar berikutnya keinginan kembali ke Khittah ini selalu muncul, misalnya di Mukttamar ke 25 di Surabaya pada 1971 dan Mukttamar ke 26 di Semarang pada tahun 1979. Tetapi kubu yang tetap menginginkan NU sebagai partai politik atau terlibat dalam partai politik masih tetap lebih dominan. Pada muktamar ke 26 tahun 1979, sebenarnya konsep kembali ke khittah telah disusun dengan jelas, dan menurut Sitompul (1989), seorang pendeta yang turut meneliti penerimaan NU terhadap Pancasila, konsep tersebut telah secara tegas menunjukkan NU sebagai organisasi keagamaan semata. Namun, dikarenakan semangat politis masih menggayuti sebagian peserta muktamar, maka identitas tersebut kabur lagi. Mukttamar 1979 itu hanya berhasil memulihkan NU sebagai organisasi keagamaan secara konseptual tetapi gagal dalam praktiknya, begitu kata Choirul Anam (1985). Pada muktamar itu, Idham Chalid sebagai pentolan yang pro NU berpolitik dan sekaligus Ketua PPP, dengan

kemampuan retorikanya yang memukau dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum Tanfidziah (Nakamura 1982).

Dengan demikian, Muktamar ke-27 pada 1984 di Situbondo itulah yang dianggap sebagai masa di mana NU secara terang kembali ke khittah. Tentu dengan perdebatan yang tidak juga segera berakhir. Setelah muktamar tersebut perdebatan antara yang menginginkan NU tetap berpolitik dengan yang tidak menghendaki lagi NU berpolitik masih terjadi. Perdebatan mencuat di media-media massa saat itu. Salah satunya Mahbub Djunaidi terlibat polemik dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, keduanya adalah tokoh yang ikut merumuskan konsep kembali ke khittah. Hanya saja Djunaidi melihat NU belum bisa sepenuhnya melepaskan diri dari politik, sebaliknya Gus Dur menganggap NU hanya mendapatkan kemudaratatan dengan terlibat dalam partai politik (Nugraha et al., 2021; Setiawan, 2018; Muhammad, 2018).

Saat NU memasuki usia satu abad, perdebatan soal ini semakin seru dengan keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh NU. Bagi kalangan PKB, pilihan politik NU jelas adalah PKB, karena partai ini didirikan oleh NU secara resmi. Tetapi yang bersikukuh dengan Khittah NU, menginginkan NU tidak boleh lagi berpartai. PKB boleh saja menjadi saluran politik warganya, tetapi secara organisasi NU tidak bisa menjadi partisan. Dalam situasi ini buku-buku dan tulisan soal Khittah kembali bermunculan. Dari dalam tubuh NU sendiri muncul tulisan-tulisan yang mencoba menjelaskan khittah secara panjang lebar misalnya dalam "*Ensiklopedi Khittah NU*," tulisan Nur Khalik Ridwan (Ridwan 2020b). Ada empat jilid tebal untuk menggambarkan hal-hal yang terkait dengan khittah. Lalu, ada buku babon setebal 742 halaman tentang sejarah Khittah NU dalam "*Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulama*," tulisan Ahmad Baso (2020). Selain dua karya itu, masih banyak lagi tulisan lainnya baik berupa buku,

artikel jurnal, artikel di koran dan majalah yang mengulas hal ini.

Namun, di tengah perdebatan soal Kembali ke Khittah ini, tulisan yang mencoba melihat dinamika kaum nahdliyin akar rumput dalam merespons keputusan 'NU Kembali ke Khittah', masih jarang. Lebih sulit lagi menemukan tulisan yang melihat respons nahdliyin terhadap Khittah NU ini dari luar Jawa. Ada beberapa tulisan yang mencoba melihat respons kaum nahdliyin dalam perkembangan politik kontemporer atau soal khittah, tetapi seputar nahdliyin di Jawa, misalnya tulisan Sukanto (2012) atau tulisan Haris (2003) dan Rakhman (2021). Mereka melihat dinamika kaum nahdliyin dalam merespons persoalan khittah dan politik NU di tingkat lokal.

Sejarah dan dinamika NU di luar Jawa memang kurang mendapat perhatian akademisi dan peneliti. Baik peneliti lokal maupun asing, terpaku memotret NU-termasuk dalam soal khittah ini-, pada pandangan para tokoh-tokohnya, gagasan yang lahir dari NU, hasil muktamar dan sejarah serta praktik NU di Jawa. Sementara di luar Jawa, nyaris tidak ada peneliti yang tertarik untuk menyelami dinamika NU. Karena itulah jika ada yang menyebutkan bahwa NU itu hanya di Jawa dan tidak ada di luar Jawa, boleh jadi karena memang tidak ada catatan yang mengulas soal NU luar Jawa.

Sebagai salah satu nahdliyin yang hidup di luar Jawa, saya merasakan jomplangnya informasi soal NU, antara NU di Jawa dan di luar Jawa, termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel) tempat saya bermukim. Saya dan banyak kalangan NU di Sulsel ini kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang sejarah NU maupun soal pandangan nahdliyin Sulsel terhadap Khittah NU dan keputusan Kembali ke Khittah pada muktamar 1984 tersebut. Satu-satunya informasi awal tentang sikap NU di Sulawesi Selatan soal khittah dan politik NU adalah ungkapan yang sering dikemukakan oleh Anre Gurutta Haji (AGH) Sanusi Baco (1937-

2021), yang semasa hidupnya adalah Rais Syuriah NU di Sulawesi Selatan. Dalam beberapa kesempatan AGH Sanusi Baco selalu mengatakan jika NU adalah dari A-X, maka NU Sulsel itu adalah X. Maksudnya jika NU itu awal berdirinya adalah sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (A) lalu berubah menjadi partai politik (X), maka NU masuk di Sulsel ini setelah menjadi partai politik (X). Tetapi apakah dengan demikian kecenderungan nahdliyin di Sulsel menginginkan NU terlibat langsung dalam politik dan bukan malah mengharuskannya berjarak? Itu juga belum bisa dipastikan. Mengingat sementara kalangan juga tidak menyetujui bahwa kecenderungan NU Sulsel adalah politik elektoral semata.

Melalui tulisan ini, saya ingin memantik diskusi soal pandangan-pandangan nahdliyin di luar titik pusatnya yaitu Jawa, dengan memotret pergumulan dan dinamika nahdliyin dalam merespons berbagai hal terkait NU, khususnya dalam hal ini ‘Khittah NU’ dan ‘Kembali ke Khittah 1926’.

## **NU, KHITTAH NU DAN KEMBALI KE KHITTAH NU DALAM LITERATUR**

NU adalah subjek kajian yang banyak menarik minat kalangan akademisi. Ibaratnya ia adalah gula yang dirubung semut. Tidak mengherankan jika literatur yang membincang NU dari berbagai aspek hingga hari ini jumlah sudah ribuan. Baik peneliti dalam negeri, peneliti asing maupun peneliti dari dalam NU sendiri (*native researcher*) telah menulis berbagai hal tentang organisasi Islam terbesar ini. Tetapi catatan mengenai NU di Sulsel sendiri masih sangat minim, sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di luar Jawa. Seorang peneliti senior NU, Hairus Salim, pernah mencoba menelusuri sejarah NU di beberapa tempat di luar Jawa, di antaranya di pulau Kalimantan, tetapi kesulitan melacak sumber-sumber tertulis. Memang NU Sulawesi Selatan sendiri sudah ditulis oleh orang, misalnya Jufri (2019), Mansyur (2019) dan Sahar (2019). Tetapi tulisan-

tulisan ini hanya mengulas sepintas soal cara dakwah NU dan pandangannya soal bunga bank di Sulawesi Selatan. Ketiganya tidak mengkaji NU dalam konteks sejarah maupun soal khittahnya.

Ada informasi yang cukup menarik dari OpenAI mengenai literatur yang membincang tentang NU di Sulsel, di antaranya disebutkan satu tulisan dari Linda Rae Bennet (2005) “*Nahdlatul Ulama and the Struggle for Islamic Identity in South Sulawesi, Indonesia*”. Artikel ini membahas bagaimana NU di Sulawesi Selatan berjuang untuk mempertahankan identitas Islamnya dalam menghadapi tekanan dari berbagai kelompok Islamis yang lebih radikal. Lalu, ada pula tulisan Andi Fathurrahman (2020), “*Mengenal NU Sulawesi Selatan: Sejarah, Peran, dan Tantangannya*”. Artikel ini, demikian diulas OpenAI, memberikan gambaran tentang sejarah dan peran NU di Sulawesi Selatan, serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi ini dalam menghadapi dinamika sosial-politik dan keagamaan di Sulsel.

Disebutkan pula tulisan tentang “*Peran Nahdlatul Ulama dalam Pembangunan di Sulawesi Selatan*” yang digarap Ismail Jusoh (2015). Tulisan ini membahas bagaimana NU di Sulawesi Selatan terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menilik dari cakupan tulisan tersebut sebenarnya ketiganya sangat penting dalam memahami sejarah dan perkembangan NU di Sulsel, sayangnya ketiga tulisan tersebut belum bisa saya temukan hingga tulisan ini terbit.

Satu-satunya buku yang berbicara soal NU di Sulawesi Selatan adalah *Dinamika NU* yang ditulis oleh Sapriillah & et al (2020). Buku ini memuat beberapa tema tentang NU di Sulsel yang bisa memberi gambaran awal terhadap perkembangan NU. Salah satu *chapter* di buku tersebut yang mengulas sepintas sejarah NU, adalah tulisan Mubarak Idrus (2020), “*NU Perkembangan dan Dinamikanya di Sulawesi Selatan*.” Tulisan

itu bisa memberi petunjuk awal tentang latar belakang muncul NU di Sulawesi Selatan.

Khusus mengenai ‘Khittah NU’ atau soal keputusan ‘Kembali ke Khittah 1926’, sejauh ini belum ada tulisan yang spesifik membicarakan dengan berbasis pada dinamika NU di Sulawesi Selatan. Adapun secara umum tulisan-tulisan soal Khittah NU dalam pandangan Ahmad Baso banyak dipengaruhi oleh kajian-kajian orientalis tentang Islam dan NU. Kajian-kajian tersebut dianggap memberi pujian ketika bicara khittah yang *apolitic*, tetapi melayangkan penilaian negatif manakala bicara politik NU. Dengan kata lain, Khittah NU dipolitisasi oleh para orientalis untuk menjadikan warga NU buta politik dan akhirnya tidak bisa ikut menentukan arah bangsa dan turut serta dalam mendesain kesejahteraan bangsa (Baso 2021).

Pandangan Ahmad Baso ini sejatinya pernah dilontarkan oleh Mahbub Djunaidi dalam polemiknya dengan Gus Dur. Djunaidi menyebutkan, mereka yang tidak ingin NU terlibat dalam politik itu sama dengan cara-cara Snouck Horgorone yang menginginkan Islam didepolitisasi. Horgorone mengharapkan Islam hanya mengurus soal agama saja di masyarakat dan jangan pernah terlibat dalam urusan-urusan politik. Gagasan Djunaidi yang masih melihat pentingnya NU berpolitik dengan tetap berbasis pada khittah pernah dilontarkan dengan istilah Khittah Plus (Setiawan 2018).

Terlepas dari pandangan Ahmad Baso tersebut, beberapa tulisan tentang khittah NU khususnya yang diungkapkan oleh peneliti barat, pada dasarnya memang memberikan penilaian yang positif ketika NU pada muktamar ke 27 di Situbondo menyatakan diri ‘Kembali ke Khittah 1926’. Keputusan muktamar tersebut ditangkap oleh para peneliti asing bahwa NU tengah berupaya kembali ke garis perjuangannya sebagai ormas keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan kembali ke khittah, NU justru dianggap tampil lebih

maju dengan pemikiran-pemikiran cemerlang, progresif dan memolopori toleransi di Indonesia, khususnya dengan tampilnya tokoh yang lebih *fresh* yaitu Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pujian ini dapat kita temukan dalam tulisan Andree Feillard, Martin Van Bruinessen, Barton, Fealy dan lainnya. Di saat yang sama tulisan-tulisan tersebut juga memperlihatkan posisi NU yang disebut menjaga jarak dengan kekuasaan dan netral dari anasir-anasir politik (Feillard 1999; van Bruinessen 1994; Barton and Fealy 1997; Fealy 2009).

Pembacaan khittah dari para Indonesianis ini memang dilakukan melalui serangkaian riset dalam waktu yang panjang, tetapi tekanan-tekanan dalam pencarian data maupun analisisnya tidak bisa dilepaskan dari selera para peneliti barat tersebut. Selera ini ditentukan oleh cara pandang mereka selama ini terhadap Islam dan NU sebagai sebuah organisasi yang sejak dari awal dianggap kelompok tradisionalis Islam. Sebagai kelompok tradisionalis, keterlibatan NU dalam politik memang tidak direkeng. Keterlibatan NU berpolitik malah dianggap sebagai ketersesatan sebuah organisasi tradisionalis Islam yang seharusnya lebih baik fokus saja pada persoalan-persoalan keagamaan. Dalam konteks semacam itu maka tentu saja para Indonesianis tersebut banyak melewatkan data-data penting mengenai khittah atau keputusan kembali ke khittah ini. Misalnya, benarkah Kembali ke Khittah artinya NU memang tidak ingin lagi terlibat dalam politik? Apa yang terjadi di tingkat nahdliyin sendiri dalam merespons hal ini? Lalu bagaimana membaca NU yang di akhir-akhir orde baru justru membuat satu partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa? Dalam satu uraian yang mendalam, hal ini telah dijawab oleh Ahmad Baso dalam bukunya “*Historiografi Khittah dan Politik NU*.”

Untuk mengetahui apa sesungguhnya Khittah NU menurut kalangan NU sendiri, tulisan Kiai Ahmad Shidiq (1980), bisa menjadi satu pedoman

yang penting. Tentu juga buku *Eksiklopedi Khittah NU* empat jilid yang ditulis oleh Nur Khalik Ridwan dan *Ngaji Khittah NU untuk Pemula*, karya Ahmad Baso, bisa pula menjadi bacaan untuk mengetahui seluk beluk dari Khittah NU tersebut. Sementara tulisan yang saya akan ulas ini akan mencoba melihat Khittah dari sudut pandang dan pengalaman nahdliyin di Sulawesi Selatan. Sebagai tulisan awal, rasanya boleh dikatakan bahwa tulisan ini hanya ingin memantik para akademisi untuk selanjutnya menulis tentang perkembangan NU dan berbagai isu-isu yang menyertainya di luar titik pusatnya, yaitu Jawa.

### SEPINTAS TENTANG KHITTAH NU DAN KEMBALI KE KHITTAH 1926

Khittah NU sebagaimana disebutkan oleh Tim Perumus Konsep Sosialisasi Khittah PWNU Jawa Timur adalah garis-garis dasar pendirian, perjuangan dan kepribadian NU (Baso 2021). Bisa pula, seperti disebutkan oleh Kiai Muchith Muzadi (2006), pedoman atau patokan yang diikuti dan ditempuh oleh orang NU dalam bergerak dan menjalankan satu hal. Dalam Keputusan Mukhtamar NU Ke 27 disebutkan, Khittah NU adalah pedoman berpikir, bersikap dan bertindak warga NU. Pedoman yang dimaksud tersebut adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia. Singkatnya Khittah NU adalah garis perjuangan atau pedoman dasar bagi seluruh warga NU dalam kehidupannya, baik sebagai warga negara maupun sebagai umat Islam.

Dalam pandangan Choirul Anam (2019), Khittah NU adalah dasar atau pijakan NU yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu Muqaddimah Qanun Asasi, Sembilan Dasar, dan Qanun Asasi. Muqodimah Qanun Asasi diambil dari pidato Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asyari saat Mukhtamar pertama pembentukan NU di Surabaya pada 31 Januari 1926. Muqodimah Qanun Asasi semacam penjelasan dari Qanun Asasi NU, yang

intinya menekankan mengapa NU dibentuk dan pentingnya persatuan dalam tubuh umat Islam dan persatuan bangsa. Hanya dengan bersatu musuh-musuh tidak akan berani berbuat macam-macam. Tentang persatuan yang dibahas dalam mukadimah tersebut relevan dengan kondisi Indonesia saat itu yang sedang menghadapi pendudukan penjajah Jepang maupun Belanda. Pidato itu juga sudah mencerminkan bahwa organisasi yang akan dibentuk ini tidak hanya akan mengurus persoalan keagamaan belaka, tetapi juga akan terlibat dalam persoalan-persoalan kebangsaan.

Adapun Qanun Asasi dari NU sendiri adalah *Statuten* atau Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU yang disusun pada saat organisasi ini pertama kali berdiri. Sementara yang dimaksudkan dengan Sembilan Dasar atau Nawasila adalah sembilan pedoman berpolitik NU yang diambil dari Keputusan Mukhtamar ke 28 di Yogyakarta. Isi dari *nawasila* tersebut dapat dilihat dari keputusan Mukhtamar ke 28 yang sudah dimuat di beberapa media. Saya mengutip dari dua media yaitu dari NU Online dan NU Cilacap Online. Isi dari nawasila tersebut sebagai berikut :

*“Pertama, Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945.*

*Kedua, Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.*

*Ketiga, Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembanagan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.*

*Keempat, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika*

*dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

**Kelima**, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

**Keenam**, Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlul sunnah wal Jamaah.

**Ketujuh**, Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah-belah persatuan.

**Kedelapan**, Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

**Kesembilan**, Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan (9 Pedoman Politik Warga NU | NU Cilacap Online, 2012.; Pedoman Berpolitik Warga NU, 2018.)."

Dalam Muktamar ke 27 di Situbondo, disusunlah kembali satu konsep tentang Khittah NU, yang ikhtisar Khittah NU itu juga seperti ciri bintang sembilan NU, terdiri atas sembilan hal pokok, yakni: Mukaddimah, Pengertian, Dasar Paham Keagamaan, Sikap Kemasyarakatan, Perilaku Keagamaan, Ikhtiyar, Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama, NU dan Kehidupan Bernegara dan Khotimah. Salah satu dari kesembilan poin tersebut,

yakni sikap kemasyarakatan belakangan menjadi sangat populer sebagai bagian dari sikap toleransi dan moderasi NU dalam masyarakat bineka. Sikap tersebut adalah:

*"A-tawassuth dan i'tidal yakni sikap tengah dengan inti keadilan dalam keadilan. At-tasamuh yakni toleran dalam perbedaan, toleran dalam urusan kemasyarakatan dan kebudayaan. At-tawazun, keseimbangan antara beribadah kepada Allah SWT, dan berkhidmah kepada sesama manusia serta keselarasan masa lalu, masa kini dan masa depan. Amar ma'ruf nahi munkar, mendorong perbuatan baik dan mencegah hal yang merendahkan nilai-nilai kehidupan."*(Ridwan 2020c)

Prinsip kemasyarakatan NU itulah yang secara jelas juga diuraikan KH Ahmad Shidiq (1980), yang kemudian menarik perhatian banyak akademisi untuk melihat gagasan-gagasan toleransi dan moderasi beragama di dalam organisasi yang dianggap tradisional ini. Salah satunya adalah Jeremy Menchik (2016) yang berdasarkan ulasan Kiai Ahmad Shidiq soal prinsip bermasyarakat dari NU itu, ia lalu menyebutkan satu konsep toleransi ala NU atau Indonesia secara umum sebagai *communal tolerance*. Satu model toleransi yang basisnya bukan pada liberalisme, tetapi nilai-nilai bersama yang dianut masyarakat.

Istilah lain yang sering muncul adalah 'Kembali ke Khittah NU 1926'. Istilah ini dimaksudkan sebagai satu sikap atau keputusan NU untuk kembali ke prinsip-prinsip dasar NU sebagai satu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dengan penekanan tidak terlibat dalam partai politik tertentu. Dalam hal kembali ke khittah dengan penekanan tidak terlibat dalam salah satu partai politik tertentu inilah, dalam tubuh NU sendiri terjadi perbedaan pandangan. Ada yang melihatnya bahwa kembali ke Khittah 1926 artinya secara mutlak NU harus mendasarkan dirinya secara kokoh dan tetap (tsabit) terhadap keputusan Komite Khittah. Artinya NU tidak akan terlibat lagi dalam partai politik atau berpolitik.

Sementara yang lain memahami sebagai sesuatu yang bersifat kontekstual. Maksud dari pandangan kedua ini, yang disebut khittah NU itu tidak hanya yang dirumuskan dalam Mukhtamar ke-27, tetapi merentang di sepanjang zaman dari cara-cara dan keputusan NU merespons situasi. Pandangan kedua ini dengan sendirinya tidak mengabaikan NU yang pernah terlibat dalam partai politik sebagai bagian dari Khittah NU itu sendiri.

Perbedaan pandangan ini disebut oleh Ahmad Baso disebut sebagai perbedaan cara pandang antara yang melihat secara parsial-partikular dan yang global-holistik. Ahmad Baso misalnya memperlihatkan itu pada dua sosok, yakni Choirul Anam yang melihat bahwa khittah adalah sesuatu yang sudah tetap, kokoh dan tidak berubah. Sementara pada sosok yang lain yaitu Kiai Muchith Muzadi, Baso melihat satu pandangan yang menempatkan khittah secara kreatif. Di tangan Kiai Muchith Muzadi, khittah tetaplah landasan pokok, yang prinsip dasarnya tidak berubah, tetapi bisa diisi dengan ide, bahkan nilai baru, tanpa harus mengubah nilai dasar tadi (Baso, 2022). Saya ingin mempertegas pandangan kedua ini, bahwa dengan demikian, keputusan Mukhtamar ke 27 Situbondo, jika merujuk pada Kiai Muchith, maka soal tidak berpartainya NU bukanlah sesuatu yang tetap (*tsabit*). Ia bisa dikreasi untuk merespons perubahan dan kondisi yang sedang dihadapi oleh NU. Hal ini selaras dengan Hasil Keputusan Munas Alim Ulama 1983, bahwa makna Khittah NU itu selaras dengan kaidah fiqih: *“Setiap hukum selalu berubah sesuai dengan illatnya, serta tabiat alam yang selalu berubah dan membawa kebutuhan-kebutuhan baru.”*

## SEJARAH DAN PERKEMBANGAN NU DI SULAWESI SELATAN

Mencari literatur sejarah dan latar belakang berdirinya NU Sulsel ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Cukup sulit, karena riset-riset tentang NU Sulsel amat jarang dilakukan oleh para

akademis, apalagi peneliti asing. Tetapi dalam sedikit data-data tentang sejarah NU di Sulsel, beberapa keterangan yang sangat berarti diperoleh dari pelaku sejarah NU. Misalnya informasi Sayyid Jamaluddin Puang Ramma yang beberapa cerita tentang NU telah disampaikan kepada beberapa aktivis NU, termasuk kepada anak beliau Syekh Puang Makka. Sejarah tentang NU juga banyak dituturkan oleh H. Abdurrahman Bola Dunia. Kata Bola Dunia di belakang namanya adalah gelar yang dilekatkan padanya saking gemarnya menggambar bola dunia jika menjelaskan dan juga karena di depan rumahnya terdapat gambar bola dunia, lambang NU. Hal ini menunjukkan dekatnya beliau dengan simbol ke-NU-an dan NU secara keseluruhan. Informasi tentang sejarah NU juga sering disampaikan oleh AGH Sanusi Baco LC, yang semasa hidupnya menjadi Rais Syuriah terlama di Sulsel.

Sebagai sebuah organisasi, demikian dijelaskan Abdurrahman Bola Dunia, NU telah dikenal di Sulsel sejak tahun 1936. Pada saat itu disebut dengan Konsulat NU, atau perwakilan resmi NU di daerah. NU pada awal-awal perkembangannya memang menggunakan istilah Konsul NU untuk perwakilan NU di berbagai daerah. Kala itu, demikian Abdurrahman, di Bulukumba, tepatnya di Bira dan juga di Makassar beberapa tokoh telah menjadi bagian dari NU. Disebutkan, yang bergabung dengan NU saat itu antara lain Walikota Makassar, Hamid Daeng Maggasing dan ada pula Abdul Rasyid Daeng Lompo, serta Husein Saleh Assegaf (Abdurrahman 2020).

Namun, untuk pendirian Konsul NU secara resmi di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran *Robithal Ulama* (RU). RU sendiri berdiri pada 8 April 1950. Terdapat beberapa ulama yang bergabung dalam RU ini, seperti Sayyid Jamaluddin Puang Ramma, KH Muhammad Ramli, KH Muh Husen Thahir, KH Ahmad Bone, KH Hasan Muhammad, KH Saifuddin dan Husein Saleh Assegaf. Tokoh-tokoh inilah yang memelopori berdirinya NU di

Sulawesi Selatan. Menurut Puang Ramma, pendirian NU di Sulsel berjalan lancar karena sebelumnya telah ada RU yang memiliki paham keagamaan yang sama. RU sendiri sudah memiliki cabang-cabang di berbagai tempat di Sulawesi Selatan. Yang menguntungkan pula karena seluruh pengurus dari RU menyatakan diri masuk ke dalam NU kecuali dua orang yaitu Habib Saleh Assegaf yang sudah aktif di Masyumi dan H. Abd Razak yang telah berkiprah di PSII (Ramly and et al 2006).

Cabang-cabang NU di Sulsel baru mulai berdiri sekitar tahun 1952 setelah kunjungan KH Wahid Hasyim ke beberapa kiai di Sulsel, termasuk menemui ulama-ulama yang berhimpun di RU. Tetapi menurut H. Abdurrahman Bola Dunia yang didasarkannya pada data-data Arsip Nasional di Sulsel, sebelum kedatangan KH Wahid Hasyim, salah satu daerah di Sulsel yaitu Pangkajene Kepulauan (Pangkep) telah mendirikan Cabang NU. Tepatnya telah didirikan Cabang Labbakang pada 25 Januari 1951. Pada saat itu yang menjadi pimpinan cabang pertama adalah, H. Bakri sebagai ketua, lalu ada Syamsuddin sebagai sekretaris (panitera) dan Dg. Ngitting sebagai bendahara. Dengan keanggotaan sebanyak 350 orang yang terdaftar, boleh dikatakan bahwa jumlah anggota NU di Labbakang pada masa itu cukup signifikan. Mengapa bisa Labbakang lebih dulu menerima NU? Jawaban paling mungkin atas pertanyaan ini karena Kepulauan Supermonde, istilah lain dari Pangkep, lebih dekat dan cepat interaksinya dengan Surabaya, tempat di mana NU berpusat dan didirikan. Para pelaut dan saudagar melintas pulang pergi antara Surabaya dengan beberapa pulau-pulau di Pangkep (Idrus 2020; Abdurrahman 2020).

Informasi lain dari AGH Sanusi Baco menyebutkan pula bahwa yang cepat mendirikan cabang atau menerima NU ini adalah Bulukumba dan Bantaeng. Kedua daerah ini sama dengan Pangkep, kemungkinannya berinteraksi dengan Surabaya melalui jalur pelayaran Bira-Surabaya. Hanya saja, kalau pendirian

cabang di Labakkang terdapat data-data yang jelas tentang kapan berdirinya dan siapa saja pengurusnya, Bulukumba dan Bantaeng hanya disebut-sebut dalam informasi lisan. Tanggal pastinya NU masuk ke Bulukumba nanti setelah kedatangan KH Wahid Hasyim. Tepatnya, 5 Februari 1952.

Kita kembali pada kedatangan KH Wahid Hasyim yang menemui ulama-ulama di Sulsel pada tahun 1952. Kiai Wahid Hasyim menemui AGH Ambo Dalle dan AGH Pabbajah. Kedua ulama karismatik pendiri Darul Dakwah wal Irsyad (DDI) tersebut, tentu saja menyambut gembira kehadiran NU di Sulsel. Mereka berdua merestui kehadiran organisasi tersebut, hanya saja tidak bisa bergabung karena keduanya telah aktif di PSII. Untuk itu kepada Kiai Wahid Hasyim disarankan menemui ulama-ulama yang berhimpun di RU. Setelah pertemuan dengan RU itulah, beberapa cabang secara resmi didirikan, di antaranya NU Cabang Bulukumba, seperti disebutkan sebelumnya, berdiri pada 5 Februari 1952. Rais Syuriah dijabat oleh KH Zainuddin Dg Mangati dan KH Abdul Jabbar serta KH Abdul Karim sebagai Wakil Rais. Di jajaran Tanfidziah ada Abdul Kahar Dg Macora yang diapuk sebagai ketua, Padalangi sebagai panitera dan jabatan bendahara diduduki oleh H. Abdullah (Idrus 2020).

NU Cabang Makassar sendiri berdiri pada 21 Februari 1953. Tokoh-tokoh NU yang sudah bergabung dengan Konsul NU sejak tahun 1930-an di Makassar, ikut memprakarsai berdirinya NU cabang ini, bersama dengan ulama-ulama yang tergabung dalam RU tentunya. Saat itu tercatat nama KH. M. Saifuddin sebagai ketua, lalu ada KH M Nashir, HM Daniel dan Abdullah Yusuf, masing-masing sebagai Wakil Ketua, panitera dan bendahara. Selain Makassar ini di tempat-tempat lain juga berdiri cabang-cabang NU, misalnya Pare-pare, Polman, Bantaeng dan beberapa kepulauan di Pangkep (Idrus 2020).

Satu hal yang perlu digaris bawahi,

ketika NU masuk ke Sulsel adalah saat di mana organisasi Islam ini terlibat dalam partai politik. Pada tahun 1952 NU yang sebelumnya tergabung dalam Partai Masyumi menarik diri dari partai tersebut. Tentu ada beberapa alasan NU menarik diri dari Partai Masyumi, tetapi tidak akan diuraikan dalam bagian ini. Tetapi satu hal yang penting, keluarnya NU dari Masyumi menandai satu gerakan politik baru di NU. Organisasi ulama ini menginginkan peran politik baru yang lebih independen dan berbasis pada kekuatan organisasi sendiri. Dalam kondisi semacam inilah NU masuk ke Sulsel. Dengan kata lain, dalam situasi NU sedang mengkonsolidasikan kekuatan politiknya, maka perlu untuk memperkuat kepengurusan di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah Sulawesi Selatan. Konsolidasi NU untuk memperkuat basis politiknya ini terbukti dalam pemilu 1955 mampu menjadi salah satu partai papan atas. Ia menyodok ke urutan ke tiga sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak mendekati Masyumi yang berada di urutan kedua (Fadli 2020).

Karena itulah pada saat pendirian NU Wilayah Sulawesi Selatan, satu tahun setelah beberapa cabang NU terbentuk, sekaligus pula menjadi satu partai politik yang disebut Partai NU. Partai ini didirikan oleh beberapa ulama seperti KH Ghozali, Sayyed Jamaluddin Puang Ramma, Andi Djemma, KH M. Ramli, Abd Rahman, KH Abdul Rasyid dan lainnya. NU baik sebagai organisasi maupun sebagai partai mengembangkan strukturnya di daerah-daerah, mulai dari tingkat cabang hingga ranting. NU menjadi satu kekuatan politik yang diperhitungkan di Sulsel. Beberapa pengurusnya menjadi tokoh-tokoh berpengaruh di struktur pemerintahan maupun di Parlemen. Menurut H. Abdurrahman, beberapa tokoh-tokoh NU menjadi bupati di kabupaten-kabupaten tertentu di Sulsel, demikian halnya di parlemen diwarnai oleh tokoh-tokoh NU (Abdurrahman 2020).

Berangkat dari sejarah masuknya

NU di Sulsel yang dimulai sebagai satu kekuatan politik dan bukan sebagai *jam'iyah diniyah ijtimaiyah* semata, cukup mempengaruhi warna NU di daerah ini. Kepiawaian berpolitik dari para pengurusnya dan kecenderungan untuk terlibat dalam even-even politik elektoral mewarnai perjalanan NU di Sulsel. Pada awalnya, kecenderungan ini membuat gerakan NU dalam bidang yang lain sedikit gagap, misalnya dalam soal pendidikan. Dalam bidang ini NU tertinggal dengan organisasi keagamaan lainnya, seperti Muhammadiyah yang memang fokus pada bidang tersebut. Tetapi meskipun demikian, tidak berarti NU waktu itu mengabaikan sama sekali bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Lembaga Pendidikan Maarif tetap dikembangkan di daerah-daerah. Pada tahun 1966 NU telah mendirikan Perguruan Tinggi, Bernama Akademi Dakwah dan selanjutnya pada tahun 1967 mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU).

Tentu saja NU di Sulsel ini mengikuti perkembangan NU secara nasional, termasuk ketika NU pada Mukhtar ke 27 memutuskan untuk kembali ke Khittah dan menjadi *Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah*. Tetapi cara NU Sulsel memaknai apa yang disebut khittah dan Kembali ke Khittah rupanya cukup fleksibel. Dalam hal ini cara pandang tersebut boleh jadi ada kesamaan dengan cara pandang KH Muchith Muzadi dalam melihat Khittah NU. Tetapi apakah persis seperti itu? Kita lihat pada uraian selanjutnya.

#### **KHITTAH NU DAN KEMBALI KE KHITTAH NU 1926 DALAM KACAMATA NAHDLIYIN DI SULSEL**

Pada bagian ini, ada dua hal yang ingin dijelaskan, yakni pandangan nahdliyin Sulsel mengenai Khittah NU dan juga pandangannya terhadap Kembali ke Khittah NU. Kedua hal itu, seperti disebutkan oleh KH Mustafa Bisri atau lebih dikenal dengan nama Gus Mus, adalah dua hal yang berbeda. Khittah NU

merujuk pada keputusan Mukhtamar NU ke 27 di Situbondo, isinya antara lain soal garis perjuangan NU dalam keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan seterusnya. Atau jika merujuk pada Gus Anam, Khittah NU berisi tiga hal pokok Muqaddimah Qanun Asasi, Sembilan Dasar dan, Qanun Asasi (Anam 2019). Sementara Kembali ke Khittah NU, seperti disebut Gus Mus pula adalah satu ide dan upaya untuk mengembalikan NU kepada jati diri dan fungsi awalnya sebagai *jam'iyah diniyah ijtimaiyah*. Penekanannya di sini adalah hubungan NU dan Politik atau tepatnya partai politik, di mana NU bukan lagi partai politik atau tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik (Baso, 2022).

### ***Pandangan dan Sikap Terhadap Khittah NU***

Pada bagian ini yang akan disorot adalah pandangan dan sikap nahdliyin Sulsel tentang Khittah NU, terutama menyangkut pandangan keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini, seperti yang telah dijelaskan dalam Ikhtisar Khittah NU, dasar keagamaan yang dianut oleh NU adalah Ahlusunnah wal Jamaah dengan berpegang teguh pada empat mazhab, yaitu Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi. Hal ini secara jelas telah tercantum pula dalam Statuten NU 1926. Kemudian disebutkan pula secara teologi berhaluan Abu Hasan al Asy'ary dan Maturidy, sementara tasawuf mengikut pada Imam al-Gazali dan Junaid al-Bagdadi (Anam 1985). Pandangan keagamaan NU ini selaras dengan paham keagamaan yang dikembangkan oleh Rabithal Ulama (RU) di Sulsel yang menjadi cikal bakal lahirnya NU di daerah ini. Sejak berdirinya pada 1950, RU telah mengembangkan pemahaman keagamaan Ahlusunnah wal Jamaah. Karena itu, NU dengan paham keagamaan yang sama, sangat mudah diterima. Tidak hanya dengan RU, tetapi dua organisasi keagamaan lainnya, yaitu As'adiyah dan Darul Dakwah wal Irsyad (DDI) juga senafas dengan paham

keagamaan dari NU. Tidak mengherankan jika dari dua organisasi itu melibatkan banyak anggotanya untuk bergabung pula dengan NU.

Pandangan keagamaan NU ini tidak persis sama dengan beberapa kelompok Islam lainnya yang juga mengaku sebagai bagian dari Ahlusunnah wal Jamaah. Di antara kelompok di luar NU yang juga mengaku Ahlusunnah tetapi berbeda dengan paham keagamaan NU adalah para pengikut wahabi. Kelompok wahabi dikenal tidak bermazhab dan juga menganggap tasawuf tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan pemikiran antara ulama NU dan Wahabi secara jelas ditunjukkan KH Muhammad Faqih Maskumambang, salah satu pendiri dan Wakil Rais Akbar NU dalam kitab *al-Nusus al-Islamiyah fi ar-Rad ala Madzhab al-Wahabiyah* (Maskumambang, 2015). Selain wahabi, kelompok Islam modernis dan kelompok islamis lainnya yang juga memiliki pandangan yang mirip satu sama lain soal pemurnian Islam, juga berbeda dengan NU yang secara tegas menyatakan dirinya bermazhab.

Dalam masyarakat Sulsel, pandangan-pandangan keagamaan NU sejatinya yang paling bisa diterima masyarakat kampung ataupun warga agraris. Kelompok masyarakat tersebut sebelum mengenal NU banyak di antaranya telah bertarekat dan mendalami tasawuf. Itulah sebabnya mereka bisa beradaptasi dengan NU yang juga menjalankan tarekat dan tasawuf. Kebanyakan masyarakat di Sulsel memang tidak mengidentifikasi diri sebagai bagian dari organisasi NU, tetapi biasanya menyebut diri mereka sebagai "Islam biasa-biasa saja" atau "Islam yang umum." Istilah itu mereka gunakan untuk membedakan diri dari Muhammadiyah atau Islam modernis lainnya.

Dalam praktiknya, yang dimaksud dengan Islam yang umum itu sebenarnya tidak lain adalah berislam *Ahklusunnah wal jamaah al-nahdliyah*. Istilah *al-nahdliyah* dibelakang *ashklusunnah wal jamaah* untuk menunjukkan ciri khas aswaja kalangan NU

(Hamzah and et al 2017). Mereka inilah yang tidak teridentifikasi secara organisasi sebagai nahdliyin, tetapi secara kultur adalah para nahdliyin.

Paham dan cara beragama NU semakin bisa diterima oleh masyarakat karena dalam mengembangkan ajaran Ahlusunnah wal Jamaah, NU memiliki strategi adaptif dan akomodatif dengan kebudayaan masyarakat setempat. Qaedah yang digunakan adalah “*al-Muhafazatul ala al-qadimi saleh wal ahzu bil jadidil aslah*” (Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih bagus). Ada dua hal dalam menjaga tradisi lama ini, pertama menjaga tradisi pengetahuan yang berbasis kitab kuning dan pengajaran pesantren dan yang kedua menjaga tradisi yang hidup di masyarakat dan mengembangkannya sedemikian rupa (Hamzah and et al 2017).

Pandangan NU yang akomodatif terhadap tradisi lama ini juga menjadi cara pandang dan sikap beragama di kalangan nahdliyin Sulsel. Baik kalangan ulama, pengurus dan aktivis muda NU, serta para nahdliyin di akar rumput memegang prinsip *al-muhafazah* dan *al-ahzu* ini. Menjaga tradisi tetapi sekaligus mengembangkan tradisi baru. NU menjadi *cultural broker* atau pialang budaya, meminjam istilah Geertz (1960), tetapi sekaligus juga *cultural trendsetter* (pengembang tradisi-tradisi baru). Istilah terakhir dilekatkan oleh Horikoshi (1987) terhadap NU dan ulamanya.

Posisi NU yang menjaga tradisi dan kebudayaan ini menjadi salah satu bagian dalam Khittah NU dan menjadi sikap serta perilaku beragama dari kalangan nahdliyin pula di Sulsel. Karena itu, di Sulsel masih sangat mudah menemukan berbagai tradisi keagamaan berbaur dengan tradisi lokal. Upacara siklus hidup sarat dengan ritual keagamaan dengan pembacaan barzanji, tetapi juga tidak kehilangan nuansa dari tradisi leluhur. Hal itu dapat dilihat dalam praktik *attompolo* (akikahan), *assalama bola baru* (selamatan rumah baru) dan berbagai upacara lainnya. Ulama NU

menjadi bagian dari upacara itu, menjadi penghubung antara agama dan kebudayaan masyarakat. Tapi pada saat tertentu menciptakan tradisi baru yang diikuti masyarakat. Salah satunya membiasakan membaca barzanji dalam upacara-upacara tersebut.

Kesaksian tentang cara beragama warga nahdliyin yang akomodatif dan mampu beradaptasi dengan kebudayaan setempat diakui oleh komunitas-komunitas lokal di Sulsel. Salah satunya adalah pengakuan dari Puang Matoa Bissu Saidi (1958-2011), pimpinan Komunitas Bissu, salah satu komunitas yang menjaga tradisi Bugis Kuno di Sulsel. Saidi mengudarkan pandangannya tentang NU ketika dia ditanya oleh Bisri Efendy, seorang budayawan dan peneliti senior dari LIPI, soal NU. Puang Matoa Saidi menyatakan bahwa ‘*NU allirinna langie* (NU adalah tiang penopang langit). Puang Moatoa Saidi lalu menjelaskan makna NU *allirinna langie* dengan mengatakan bahwa NU-lah yang menopang ajaran langit (Islam) agar tetap bisa hidup di tengah masyarakat. Selain itu, sebagai tiang yang menghubungkan langit, demikian Saidi, NU berhasil menjadi penyambung antara ajaran Islam dengan tradisi masyarakat Bugis (Syamsurijal 2020). Ia berfungsi, seperti disebut Geertz (1960), *the main connecting link*, penghubung utama antara Islam dan tradisi lokal. Pernyataan Saidi berdasarkan pengalaman yang dia lihat dari cara para ulama-ulama NU memperlakukan tradisi lokal masyarakat. Selain itu, Saidi juga sedang menggambarkan *lived religion*, agama dalam kehidupan sehari-hari, demikian istilah Elizabeth Shakman Hurd (2015) dari para nahdliyin di Sulsel.

Dalam hal bermasyarakat, ada empat prinsip yang dikembangkan oleh NU dan juga menjadi ciri bermasyarakat para nahdliyin di Sulsel, yaitu tawasuth dan itidal, tawazun, tasamuh, amar makruf nahi mungkar. Hal ini tercermin dari karakter yang dikembangkan oleh para nahdliyin dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat di sekitarnya. Para aktivisnya

dengan menggunakan prinsip tasamuh bisa bergaul lintas agama. Banyak lembaga *Civil Society* yang didirikan oleh para aktivis NU yang bergerak dalam mempromosikan toleransi dan pengakuan atas keragaman. Beberapa di antara mereka terlibat aktif dalam menangani kasus-kasus diskriminasi yang dialami kelompok keagamaan dan suku minoritas.

Di antara lembaga itu ada yang merupakan bagian dari organisasi NU. Misalnya, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) tingkat provinsi Sulsel dan juga terdapat di beberapa kabupaten. Ada pula Lembaga Ta'lif wa Nasyr (LTNNU Sulsel) yang mengampanyekan nilai-nilai tasamuh dan tawasuth melalui media sejak tahun 2018. Di luar itu, tumbuh pula LSM yang secara organisasi tidak terkait dengan NU, tetapi didirikan dan dikelola para aktivis NU. Misalnya, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Masyarakat Pesantren (LKPM) (Ridwan 2020a).

Lembaga-lembaga *civil society* tersebut juga aktif dalam mendukung salah satu garis perjuangan yang dituangkan dalam Khittah NU, khususnya yang termaktub dalam Statuten 1926. Garis perjuangan yang dimaksud adalah: "NU memerhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-suru dan pondok-pondok; begitu juga dengan hal-hal lainnya anak yatim, orang-orang fakir miskin; serta mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian dan perniagaan yang tidak terlarang oleh syariat agama Islam" (Ridwan, 2020d). Lembaga-lembaga tadi, misalnya LAPAR, aktif mendampingi petani dan masyarakat lokal/adat sejak tahun 2000-an. Mereka juga aktif mendampingi kaum miskin kota, anak-anak jalanan di Karuwisi Makassar dan memberikan pengajaran agama berbasis Ahlusunnah wal Jamaah serta mengajar membaca al-Qur'an sepanjang 2000-2004. Kedua kelompok masyarakat itu merupakan basis nahdliyin di Sulawesi Selatan.

Harus diakui, aktifnya berbagai kelompok *civil society* di tubuh NU Sulsel, memang setelah NU menyatakan diri Kembali ke Khittah pada Mukhtamar ke-27 pada 1984 tersebut. NU melalui BLPM-Lakpesdam dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK) mulai aktif mendampingi masyarakat yang menjadi basis nahdliyin sebagai wujud dari pelaksanaan khittah tersebut. Meski demikian, tahun-tahun 70-an-hingga 80-an awal, atau bahkan sebelum tahun-tahun tersebut, tidak berarti bahwa NU Sulsel tidak berkibrah di bidang sosial dan budaya.

Lembaga seni dan budaya NU yang bernaung di bawah Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, demikian singkatan Lesbumi kala itu (tahun 2010 barulah berubah menjadi Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia), sangat aktif. Para seniman dan budayawan yang berhimpun di dalamnya aktif melakukan pementasan seni dan berbagai gerakan kebudayaan. Kegiatan mereka dalam rangka menggelorakan nilai-nilai yang menjadi garis perjuangan NU yang terdapat dalam khittah. Selain itu, terdapat pula Radio al-Qawakib milik NU yang intens menyuarakan garis perjuangan NU; baik paham keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan garis perjuangan politiknya. Saya mendapatkan cerita dari budayawan senior Sulsel bahwa saat itu saking kuatnya pertarungan ideologi antara paham keagamaan yang dikembangkan oleh NU dengan kaum modernis, hingga merembet ke pementasan seni. Tokoh-tokoh Lesbumi Sulsel, di antaranya Rahman Arge, yang terkenal dengan puisinya, '*Mate ni Santanggi*', bersama rekan-rekannya mementaskan drama yang berjudul "Membakar Matahari." Judul drama itu memantik semangat dari Muhammadiyah untuk membalasnya dengan pementasan drama 'Meruntuhkan Bola Dunia' (judulnya kurang lebih demikian).

Beberapa persoalan nahdliyin Sulsel dalam kaitannya dengan Khittah NU justru baru muncul pasca reformasi hingga

saat ini. Pasca reformasi memang bermunculan kelompok-kelompok Islam yang berhaluan salafi, wahabi serta kelompok islamis lainnya. Banyak di antara nahdliyin, mulai dari jamaah di akar rumput sampai ke pengurus, justru terpengaruh dengan kecenderungan beragama dan paham kebangsaan yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang baru bermunculan tadi. Beberapa dari kaum nahdliyin tersebut justru mulai kabur dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh NU. Di antara nahdliyin juga muncul orang-orang tertentu, bahkan pengurus cabang yang memiliki cara pandang kebangsaan yang tidak mengikuti lagi haluan atau Khittah NU. Mereka condong bersimpati pada keinginan kelompok islamis tertentu yang menginginkan bentuk negara khilafah atau paling tidak menginginkan Indonesia mengganti dasar negaranya menjadi Syariat Islam.

Propaganda para pengusung khilafah dengan menyebut bahwa NU dalam sejarahnya adalah pendukung Indonesia berdasarkan Syariat Islam, memang mempengaruhi banyak nahdliyin di Sulsel. Dalam sejarah berdirinya negara republik ini, NU memang berdiri pada kelompok yang mengusulkan Syariat Islam sebagai dasar negara. Tokoh pendiri NU pernah pula terlibat dalam Kongres al-Islam. Tetapi dalam membaca sejarah itu, para propagandis yang berupaya mempengaruhi nahdliyin tidak menuntaskannya. Mungkin karena tidak tahu, bisa juga memang sengaja dilakukan.

Dalam sejarahnya tokoh-tokoh yang kelak mendirikan NU terlibat dalam Kongres al-Islam hanya sampai Kongres ke-IV. Kongres ini sendiri digelar hingga sembilan kali. Kongres al-Islam pertama kali digelar pada 1922 yang membicarakan sistem kekhalifahan. KH Wahab Hasbullah dan KH Asnawi Kudus ikut dalam kongres tersebut. Tetapi dalam kongres ke IV tahun 1925, tokoh-tokoh dari ulama tradisional mulai berbeda pandangan dengan kelompok modernis dan islamis. Tokoh-

tokoh modernis dan islamis saat itu masih bersikukuh mendukung Raja Saud sebagai khilafah bagi seluruh dunia Islam. Sementara ulama dari kalangan tradisional malah menginginkan adanya protes ke Raja Saud yang tidak berkompromi terhadap mazhab dan praktik keagamaan kelompok tradisional. Kelompok tradisional kemudian menarik diri, lalu mengirim sendiri utusan ke Makkah yang dikenal dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz ini yang menjadi cikal bakal lahirnya NU (Aziz 2011).

Dalam perumusan dasar negara, NU pada awalnya juga mendorong negara berdasarkan Islam. Tetapi ketika akhirnya diambil kesepakatan bahwa bentuk negara yang bisa diterima oleh semua kalangan adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik dengan Pancasila sebagai dasarnya. NU tunduk pada keputusan bersama itu. NU bahkan ikut menyetujui hilangnya tujuh kata pada sila pertama Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Setelah disepakati bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan republik berdasarkan Pancasila, NU kemudian berkomitmen mengawalinya. Terbukti dari beberapa kali muktamar, NU selalu menghasilkan keputusan yang menunjukkan kebulatan tekad dalam mendukung dan menjaga NKRI berdasarkan Pancasila. NU bahkan mengeluarkan keputusan yang menunjukkan bahwa organisasi ini tidak menyetujui gerakan yang dilakukan oleh sementara umat Islam yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dan memandangnya sebagai bughat (pemberontakan pada pemerintahan yang sah). Dalam satu gelaran musyawarah Alim Ulama 1954, ulama NU merumuskan satu keputusan bahwa Soekarno adalah *waliyul amri al-daruri bi syaukah* (pemegang kekuasaan negara darurat).

Tentang keputusan *waliyul amri daruriyah bi syaukah* beberapa propagandis khilafah memelintir bahwa ulama-ulama saat itu hanya mengakui kepemimpinan Soekarno untuk sementara. Padahal, seperti

dijelaskan KH Wahab Hasbullah, disebut *waliyul amri al-daruri* atau *imam al-daruri*, karena mustahil lagi untuk mendapatkan *Imam A'dham* yang memang disepakati sebagai pemimpin negara dan agama. Mengapa? Sebab *Imam A'dham* itu harus dari orang yang memiliki pengetahuan Islam sederajat dengan Mujtahid Mutlak. Dan sejak 700 tahun yang lalu kriteria ini sudah tidak ada (Anam 1985).

Selanjutnya komitmen NU terhadap bentuk negara Indonesia terlihat lebih gamblang dalam keputusan di Mukhtar ke 27 di Situbondo, 1984 tersebut. Dalam mukhtar itu, NU dengan tegas menerima asas tunggal Pancasila. Di sini banyak kalangan melihat bahwa NU telah berhasil mendialogkan dengan baik antara Islam dan bentuk negara yang dianut di Indonesia. Gagasan ulama saat itu merupakan ijtihad jenius yang diakui oleh berbagai kalangan sebagai gagasan kebangsaan geniun ulama nusantara.

Sejarah NU semacam inilah yang di beberapa kalangan nahdliyin, khususnya di cabang-cabang yang berada di kabupaten, tidak dipahami secara utuh. Apalagi di antara yang masuk menjadi anggota NU bahkan pengurus tidak melalui proses pengaderan. Mereka hanya menjadi NU karena pejabat atau juga karena menginginkan jabatan. Memang ada kesan di hari-hari setelah reformasi, untuk menjadi pejabat khususnya di lingkaran Kementerian Agama, maka anda harus menjadi NU. Kesan itu tentu saja tidak sepenuhnya benar, tetapi karena terlanjur diyakini oleh banyak kalangan, maka ramailah mereka masuk NU. Tetapi setelah menjadi NU, mereka ternyata tidak mengerti sejarah dan khittah dari NU itu sendiri, jadilah mereka begitu mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok di luar NU.

### ***Pandangan dan Sikap Terhadap Kembali Ke Khittah dan NU Berpolitik***

Penekanan saya pada bagian ini adalah pandangan dan sikap nahdliyin Sulsel soal Kembali ke Khittah dalam

pengertian 'NU tidak terlibat dalam partai politik atau menghindari terseret dalam politik electoral'. Mengenai hal ini, saya akan memulai dari ungkapan yang selalu disampaikan oleh AGH Sanusi Baco. Jika NU itu A-X, maka NU yang pertama kali masuk ke Sulsel adalah NU X. Di mana A menunjukkan NU sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiah (Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan) dan X adalah NU sebagai Partai Politik atau organisasi yang aktif terlibat dalam politik. Penjelasan AGH Sanusi Baco menunjukkan sejarah masuknya NU di Sulsel terkait erat dengan posisi NU sebagai partai politik. Seperti telah diuraikan sebelumnya, NU masuk di Sulsel memang saat sedang melakukan konsolidasi untuk menjadi partai politik sendiri, lepas dari Masyumi. Pilihan NU untuk keluar dari Masyumi dan menjadi Partai Politik sendiri dianggap berhasil. Dalam pemilu pertama yang diikuti Partai NU (1955) langsung menyodok ke tiga besar dengan perolehan suara 18,4% (Fealy 2009).

NU Sulsel pada awal berdirinya memang tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Gerakan yang dilakukannya adalah bagian dari mengkonsolidasi kekuatan untuk menghadapi pemilu tahun 1955. Tokoh-tokohnya saat itu, seperti Sayyed Jamaluddin Puang Ramma bertugas mengkonsolidasi para raja-raja dan bangsawan, KH M. Ramli menguatkan hubungan dengan ulama dan KH Saifuddin bertugas untuk membangun hubungan dengan pengusaha. KH M. Ramli, ulama dengan ilmu agama yang mendalam dan disegani ini kemudian mendirikan Partai NU. Pada pemilu 1955, ia sendiri lolos menjadi Anggota Konstituante dari Partai NU.

Perolehan suara NU di Sulsel dalam Pemilu 1955 termasuk yang tertinggi di luar Jawa. Di luar Jawa terkumpul 1.018.072 suara atau 14,6% suara dari keseluruhan partai. Dari jumlah itu Sulsel mengumpulkan 16% suara. Di luar Jawa, Sulsel hanya lebih rendah dari Kalimantan Selatan, yang mengumpulkan 37% suara

(van Marle 1956). Partai NU di Sulsel menempati urutan ke dua dan berhasil meloloskan 2 anggota parlemen ke pusat, yakni Husein Saleh Assegaf dan Hadji Muhammad Saifuddin bin H.M.Nur. Selain itu juga meloloskan beberapa orang menjadi anggota konstituante, yakni : K.H.Muhammad Ramli, H.S. Djamaluddin Daeng Paremma, Abdul Muin Daeng Myala, Gulam, dan Ny. Siti Djamrud Daeng Tjaja. Di tingkat daerah sendiri, banyak anggota NU yang lolos menjadi anggota parlemen. Sayyid Jamaluddin Puang Ramma salah satunya. Selain itu tokoh perempuan, Ketua Muslimat NU pertama Region Sulawesi, Annang Guru Aisyah juga lolos menjadi anggota Parlemen di Sulsel.

Melihat dari sejarah masuknya NU di Sulsel, maka tidak heran jika warna NU di daerah ini dipengaruhi oleh NU X meminjam istilah AGH Sanusi Baco tadi. Kecenderungan X ini tampaknya tidak hilang ketika NU sendiri telah menyatakan diri Kembali ke Khittah dalam Mukhtamar ke 27 pada tahun 1984. Tentu saja para nahdliyin di Sulsel mematuhi bahwa NU tidak lagi menjadi partai politik, tetapi bahwa NU tetap harus berpolitik dan mewarnai perpolitikan lokal, tidak hilang dari nalar kaum sarungan Sulsel ini. Setelah NU dinyatakan tidak menjadi bagian dari partai politik khususnya PPP, di Sulsel beberapa tokoh NU memilih bergabung dengan Partai Golkar. Salah satunya Gurutta Arifuddin Cawidu yang pernah menjabat sebagai Ketua Tanfiziah NU. Ia adalah salah satu pentolan Partai Golkar yang berhasil menjadi anggota legislatif beberapa periode.

Dalam penjelasan beberapa tokoh-tokoh NU di Sulsel, keterlibatan NU dalam

berpolitik dianggap penting. Sikap menghindari berseberangan dengan pemerintah, sebagai bagian dari sikap politik akomodatif dari NU salah satunya ditempuh dengan terlibat dalam partai politik milik pemerintah. Itulah alasan mengapa beberapa tokoh-tokoh NU memilih ikut Golkar pada masa orde baru. AGH Sanusi Baco dalam beberapa kali pidatonya menyebutkan pembangunan beberapa aset-aset NU, tidak bisa dilakukan tanpa adanya jaringan dengan pemerintah. Keterlibatan orang-orang NU dalam partai politik ataupun di jabatan pemerintahan dapat memudahkan berjalannya agenda-agenda NU dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan (khususnya pesantren), pemberdayaan petani dan seterusnya. Istilah AGH Sanusi, orang NU yang menjadi pejabat atau berkecimpung di partai dapat '*membenarkan*' (istilah kebalikan dari menyalahgunakan) posisi dan jabatannya.

Itulah sebabnya, ketika NU membentuk PKB di akhir-akhir kekuasaan orde baru, Sulsel adalah salah satu yang paling antusias menyambut partai tersebut. Segera setelah adanya partai tersebut, di Sulsel juga langsung dibentuk PKB. Rapat perdana Tim 9 (tim yang ditugaskan membentuk PKB) dilakukan di Gedung NU, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Dalam pemilu 1999, PKB Sulsel meloloskan 2 orang ke Parlemen. Raihan suara terbanyak PKB terjadi pada pemilu 2019 lalu. Selain meloloskan dua orang anggota parlemen ke pusat, juga berhasil membentuk satu fraksi di DPRD Sulsel. Di tingkat kabupaten rata-rata juga berhasil meloloskan anggota partainya menjadi legislatif.

*Tabel 1*  
*Data Kursi PKB di DPRD Tingkat I Sulsel pada Dua Pemilu*

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
<b>PKB</b>	3	8
<b>Gerindra</b>	11	11
<b>PDI-P</b>	5	8
<b>Golkar</b>	18	13
<b>NasDem</b>	7	12
<b>PKS</b>	6	8
<b>PPP</b>	7	6
<b>PAN</b>	9	7
<b>Hanura</b>	6	1
<b>Demokrat</b>	11	10
<b>PBB</b>	1	0
<b>PKPI</b>	1	0
<b>Perindo</b>		1
<b>Jumlah Anggota</b>	85	85
<b>Jumlah Partai</b>	12	11

*Sumber: Data dari Wikipedia (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2020)*

Dalam pandangan beberapa tokoh-tokoh NU di Sulsel, sejak awal pendirian NU itu, meski dalam statutenya disebut sebagai organisasi keagamaan dan sosial saja, tetapi juga memiliki dimensi politik. Politik di sini tentu saja tidak dimaknai secara sempit, hanya untuk merebut kekuasaan. Dalam pandangan Ahmad Baso (2021), kepentingan politik NU pada awal berdirinya adalah bagaimana membebaskan Indonesia dari penjajahan, tetapi sengaja disamarkan agar pemerintah kolonial bisa mengizinkan NU berdiri. Sementara Raharjo Jati melihat dimensi politik ulama dalam mendirikan NU adalah sebagai wadah perjuangan untuk mengembangkan paham keagamaan ulama tradisional di tengah maraknya paham keagamaan modernis (Raharjo Jati 2012).

Karena itulah, demikian penjelasan selanjutnya para tokoh NU Sulsel, Kembali ke Khittah itu, tidak berarti NU tidak bisa lagi berpolitik, hanya saja harus disadari bahwa NU tidak bisa lagi secara langsung terlibat dalam partai politik, meskipun tetap harus memberi warna terhadap perpolitikan tanah air atau lebih spesifik lagi di Sulsel. Ulama-ulama NU sejatinya dianggap memiliki pandangan politik yang luas dan

berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip tentang *tasarruful imam ala arraiyah manutun bil maslaha* yang menjadi landasan politik para ulama, itu dipahami secara dalam dan para ulama memiliki strategi untuk mewujudkannya. Di Sulsel sendiri telah dibuktikan oleh ulama-ulama pendiri NU, misalnya KH M. Ramli yang terlibat di konstituante. Ia ulama politisi yang diperhitungkan karena gagasan-gagasan politiknya. Kenyataan ini tidak sama dengan pandangan miring para Indonesianis yang cenderung mencemooh keterlibatan NU dalam politik electoral. NU dianggap tidak tahu berpolitik, 'bodoh' dan jumud, oportunistis dan bahkan koruptif.

Greg Fealy, salah seorang yang juga mengkritik tajam NU yang berpolitik, *toh* dalam beberapa tulisannya juga mengakui secara objektif bahwa pemimpin NU yang terlibat dalam politik bukanlah orang yang tidak berpengalaman dan tidak bisa dengan mudah dipermainkan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang pandai dan memiliki visi politik yang jelas. Yang meragukan NU itu adalah orang yang tidak senang NU berpolitik, yang seperti ditegaskan oleh KH Wahab Hasbullah yang menghembuskan propaganda kepada orang NU agar tidak

percaya pada kekuatan NU-nya sendiri. Padahal ibarat senjata NU adalah meriam yang sesungguhnya, bukan batang kelapa atau meriam tiruan (Fealy 2009).

Selanjutnya, menurut Fealy (2009) lagi, politik NU yang sering disangka oportunistis, hanya mencari aman dengan kekuasaan agar bisa mendapatkan penghasilan dan kursi jabatan, sesungguhnya hanya tidak memahami akar politik NU yang berbasis akar politik sunni. Politik sunni itu mengedepankan keluwesan, akomodatif dibanding konfrontatif, tetapi semua itu diarahkan pada kepentingan kemaslahatan umat. Bukan untuk kepentingan orang perorang atau hanya untuk meraih jabatan tertentu. Karena itu, *qaedah-qaedah* fikih yang kental dalam lingkungan NU, sering juga diterapkan dalam berpolitik, misalnya *akhaffud dararain* (memilih resiko yang lebih kecil), *darul mafasid muqaddamu ala jalbi masalih* (menghindari bahaya diutamakan daripada melaksanakan kebaikan) dan *ma la yudraku kulluhu, la yutraku ba'duhu* (Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan sebagian yang bisa diraih).

Salah satu yang mendorong NU Kembali ke Khittah dalam arti tidak lagi terlibat dalam partai politik, karena beberapa ulama, seperti Kiai Ahmad Siddiq, menyadari banyak hal penting dalam bidang pendidikan, social dan kebudayaan yang terabaikan. Jadi pada dasarnya, bukan karena NU tabu berpolitik, tetapi karena ada satu fakta di mana keterlibatan NU berpolitik dalam rentang tahun 60-80-an, menyebabkan terbengkalainya urusan sosial keagamaan. Menurut cerita yang disampaikan oleh Hairus Salim, yang sumbernya dari Gus Mus, saat NU aktif berpolitik di partai, kantor NU tidak pernah didatangi pengurus, terbengkalai, karena rata-rata sibuk di kantor PPP. Tetapi yang menarik, kenyataan seperti itu tidak sepenuhnya terjadi di Sulsel. Memang diakui oleh AGH Sanusi Baco, dalam bidang pendidikan, NU saat berpartai cukup teragap-gagap. Tetapi

dalam bidang lain tetap berjalan baik. Gerakan Seni-Budaya melalui Lesbumi aktif, dakwah melalui ulama-ulama di berbagai tempat berjalan lancar, termasuk melalui corong radio al-Qawakib. Secara tak sengaja hal ini dikemukakan pula oleh Peacock (2016) dalam lawatan risetnya ke Sulsel. Ia berkunjung ke kantor NU dan tidak menemui satu pun pengurus NU di kantornya. Tetapi, ketika itu, ia diberi tahu oleh penjaga kantor: “kalau ingin cari pengurus NU, cari di warung kopi, di sanalah tempat NU berbaur dengan rakyat, berdialog dengan rakyat dan mengurus urusan rakyat.”

Kuncinya, menurut AGH Sanusi Baco, adalah adanya orang yang khusus menjalankan politik melalui partai dan yang lain mengurus NU sebagai *Jam'iyah Diniyah Ijtimaiah*. Keduanya tidak boleh campur aduk. Jangan yang mengurus NU, juga mengurus partai politik. Tetapi NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, tetap perlu berpolitik, baik dalam arti politik kebangsaan maupun terlibat langsung secara praktis di tingkat legislatif maupun eksekutif. NU adalah representasi dari mayoritas umat Islam Indonesia dan mayoritas umat Islam Indonesia adalah kalangan bawah yang termarginalkan. Mereka adalah petani, buruh, nelayan dan pedagang kecil. NU lah sebenarnya yang paling mengetahui likaliku kehidupan mereka dan karenanya NU harus memperjuangkannya melalui politik ‘kemaslahatan umat’.

## PENUTUP

Khittah NU dalam pandangan nahdliyin Sulsel pada dasarnya sama juga dengan nahdliyin lainnya di Jawa. Bahwa Khittah NU adalah garis perjuangan NU yang menjadi pedoman dari perjuangan seluruh kaum nahdliyin. Tetapi tampaknya garis perjuangan ini tidak sepenuhnya dipahami oleh seluruh nahdliyin atau merasa dirinya nahdliyin. Itulah sebabnya beberapa pandangan dan praktik keagamaan dan kebangsaan yang berasal dari luar NU memengaruhi pandangan dan

sikap para nahdliyin Sulsel. Hal ini disebabkan karena beberapa kalangan yang menjadi anggota NU tanpa melalui proses pengaderan di NU. Mereka masuk atau dimasukkan karena jabatan dan posisinya. Atau sebaliknya ada yang masuk ke NU karena membutuhkan jabatan. Hal ini sepertinya telah disadari oleh pengurus NU dengan membangun proses pengaderan yang masif, di luar yang sudah dilakukan oleh organisasi otonom NU.

Hal penting lainnya adalah soal pemaknaan NU Kembali ke Khittah yang tidak terlibat dalam partai politik. Dalam hal ini, di kalangan nahdliyin Susel menganggap bahwa hal tersebut tidak bisa dibaca bahwa NU apolitik. NU tetap harus terlibat politik, hanya saja pengurus NU tidak boleh lagi mengelola partai. Tetapi visi dan misi politik, tidak ada salahnya dibangun di NU, untuk selanjutnya direkomendasikan pada partai politik yang dianggap bisa memperjuangkan visi dan misi tersebut. Kecenderungan NU Sulsel adalah memandatkan rekomendasi tersebut pada PKB, meski tidak menutup kemungkinan juga pada partai lain.

Kecenderungan NU Sulsel untuk tetap terlibat dalam politik, tidak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya NU ke daerah ini. Karena NU masuk pada saat menjadi Partai Politik, maka ulama pendirinya juga menjadi politisi. Tetapi mereka adalah politisi yang memiliki visi politik yang jelas. Strategi politik yang adaptif, luwes dan lebih cenderung kompromistis digunakan untuk meraih tujuan-tujuan politik kebangsaan dari NU. Tujuan politik kebangsaan berujung pada *masalah al-ummah* (kemaslahatan umat), ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial. Visi politik tersebutlah yang saat ini perlu dievaluasi ulang. Apakah benar, misalnya, kecenderungan berpolitik nahdliyin di Sulsel atas dasar mewujudkan visi politik kebangsaan NU. Atau justru terjebak hanya sebagai jalan untuk mendapatkan jabatan, kursi dan memperbanyak pendapatan pribadi. Sejujurnya harus diakui, banyak contoh yang menunjukkan beberapa

kalangan justru hanya memanfaatkan posisi politik NU yang memang diperhitungkan sejak dulu. Mereka berpolitik untuk kepentingan cari jabatan. Maka banyak di antara orang yang mengaku NU hanya karena ingin meraih kursi tertentu atau mempertahankan kursinya.

Orang-orang NU seperti itulah yang akhirnya membenarkan pandangan-pandangan miring para pengamat NU, terutama yang berasal dari luar NU. Mereka menyebut, NU berpolitik hanya cari kesempatan dapat jabatan, dari jabatan memperbanyak pendapatan, lalu ujung-ujungnya korupsi. Itulah sebabnya para peneliti asing memandang sebelah mata dengan NU yang berpolitik, tetapi mereka mengagung-agungkan NU ketika mengasingkan diri dari politik.

Pengaderan untuk menginternalisasi visi politik NU ke para nahdliyin pada titik krusial semacam ini menjadi penting. Tema tentang itu harus menjadi satu materi yang diajarkan dalam pengaderan-pengaderan NU. Doktrin Politik NU, yang setidaknya bisa dibagi dalam beberapa kategori utama, yaitu kebijaksanaan, keluwesan, moderatisme dan kepentingan *mabadi khairah ummah* (membangun umat yang terbaik) harus dipahami kepada para kader NU. Supaya yang dimaksud keluwesan, tidak dimaknai sebagai menghalalkan segala cara. Kebijakan tidak dianggap sebagai sikap *nrimo* tanpa kekritisannya sama sekali. Dan kepentingan tidak ditafsirkan sebagai kesempatan cari jabatan dan pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Politik Warga NU* | NU Cilacap Online." 2012. February 12, 2012. <https://pcnucilacap.com/9-pedoman-politik-warga-nu/>.
- Abdurrahman. 2020. "Dari Akademi Dakwah Sampai Ke Universitas Islam Makassar." In *Dinamika NU*. Makassar: Lakpesdam Sulsel.
- Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Salatiga: Jatayu.

- . 2019. *NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan Siapa Yang Bertanggung Jawab?* Surabaya: Duta Aksara.
- Aziz, Abdul. 2011. *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Alvabet.
- Barton, Greg, and Greg Fealy. 1997. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Baso, Ahmad. 2021. *Historiografi Khittah Dan Politik Nahdlatul Ulama: Sebuah Kontribusi Untuk Politik Indonesia Dan Studi Keislaman Nusantara*. Jakarta: Yayasan Garuda Bumandhala.
- Bruinessen, Martin van. 1994. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.” 2020. <https://id.wikipedia.org/>. 2020.
- Adli, Muhammad Rijal. 2020. “Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang.” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4 (1): 34. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7927>.
- Fealy, Greg. 2009. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. IV. Yogyakarta: LKiS.
- Feillard, Andree. 1999. *NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk Dan Makna*. Yogyakarta: LKiS.
- Geertz, Clifford. 1960. “The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker.” *Comparative Studies in Society and History* 2 (2).
- Hamzah, Muchtob, and et al. 2017. *Pengantar Studi Aswaja Al-Nahdliyah*. Yogyakarta: LKiS.
- Haris, Abdul. 2003. “Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) Di Era Multi Partai Pasca Orde Baru.” *Istiqro* 2 (01).
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Hurd, Elizabeth Shakman. 2015. *Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Idrus, Mubarak. 2020. “NU; Perkembangan Dan Dinamikanya Di Sulawesi Selatan.” In *Dinamika NU*. Makassar: Lakpesdam.
- Jamil, Robit Nurul, Hermanu Joebagjo, and Djono. 2018. “Psychohistory Dalam Kajian Self-Esteem Teks Deklarasi NU 1983 Tentang Hubungan Pancasila Dan Islam.” *Jurnal Theologia* 29 (2): 271–94.
- Jufri, Muhammad. 2019. “Kajian Hadis-Hadis Tentang Dakwah Kultural Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan (Analisis Pendekatan Hadis Tarbawiy).” *Al-Ishlah: Jurnal Studi Pendidikan* 14.
- “Khittah NU.” 2012. NU Online. September 14, 2012. <https://www.nu.or.id/nasional/khittah-nu-44rmP>.
- Mansyur, Fakhruddin. 2019. “Bunga Bank Di Sulawesi Selatan (Muhammadiyah Dan NU).” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1 (2). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i2.2293>.
- Marle, A van. 1956. “The First Indonesian Parliamentary Elections.” *Indonesia* 9.
- Maskumambang, K.H. Muhammad Faqih. 2015. *Menolak Wahabi: Membongkar Penyimpangan Sekte Wahabi; Dari Ibnu Taimiyah Hingga Abdul Qadir At Tilmisani*. Depok: Sahifah.
- Menchik, Jeremy. 2016. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1353/ind.2017.0015>.
- Muhammad, K.H. Husein. 2018. *Gus Dur Dalam Obrolan Gus Mus*. Jakarta Selatan: Noura Books.
- Muzadi, KH.Abdul Muchith. 2006. *NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran (Refleksi 65 Tahun Ikut NU)*. Surabaya: Khalista.
- Nakamura, Mitsuo. 1982. *Agama Dan Perubahan Politik*. Surakarta: Hapsara.
- Nugraha, Farhan, Muhammad Fakhruddin, and Humaidi. 2021. “Mahbub Djunaidi,

- Seniman Politik Nahdlatul Ulama (1960-1987)." *Pendidikan Sejarah* 10 (2): 159–74.
- Peacock, James.L. 2016. *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam Di Indonesia*. Suara Muhammadiyah.
- "Pedoman Berpolitik Warga NU." 2018. NU Online. August 8, 2018. <https://www.nu.or.id/fragmen/pedoman-berpolitik-warga-nu-3MqAg>.
- Raharjo Jati, Wasisto. 2012. "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama." *Ulul Albab* 13 (1): 95–111.
- Rakhman, S. 2021. "Dinamika Perkembangan Politik Nahdatul Ulama Pasca Khittah Tahun 1984-1999." *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah* 1 (1).
- Ramly, Muawiyah, and et al. 2006. *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam*. Edited by A. Muawwiyah Ramli. Jakarta: OPSI.
- Ridwan, Nur Khalik. 2020a. *Ensiklopedia Khittah NU; Dinamika Jam'iyah*. Vol. 2. Yogyakarta: DIVA Press.
- . 2020b. *Ensiklopedia Khittah NU; NU, Politik & Kebangsaan (1914-2019)*. Vol. 3. Yogyakarta: DIVA Press.
- . 2020c. *Ensiklopedia Khittah NU; Sejarah Pemikiran Khittah NU*. I. Yogyakarta: Diva Press.
- . 2020d. *Ensiklopedia Khittah NU; Sejarah Pemikiran Khittah NU*. Vol. 1. Yogyakarta: DIVA Press.
- Sahar, Syahriani. 2019. "Strategi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan." *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 1 (1).
- Saprillah, and et al. 2020. *Dinamika NU*. Makassar: Lakpesdam Sulsel.
- Setiawan, Edi Eka. 2018. *Mahbub Djunaidi Dan Khittah Plus NU*. Tuban: Karya Litera Indonesia.
- Shidiq, KH. Achmad. 1980. *Khittah Nahdliyah*. Surabaya: Balai Buku.
- Sitompul, Einar Martahan. 1989. *NU Dan Pancasila*. Jakarta: Muliastari.
- Sukamto, Sukamto. 2012. "Kilas Balik Khittah NU Dalam Konteks Politik Lokal Di Jombang." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2 (1). <https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.1.22-45>.
- Syamsurijal. 2020. "Nahdlatul Ulama Di Sulawesi Selatan; Masihkah Menjadi Alliringna Langi'E." In *Dinamika NU*. Makassar: Lakpesdam Sulsel.
- Watt, W. Montgomery. 1968. *Islamic Political Thought: The Basic Concepts*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

# JURNAL MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan  
ISSN: 2476-320  
E-ISSN: 2775-068X

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Kementerian Agama

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL MIMIKRI

- ▢ Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia dalam bidang kajian yang meliputi; Sosial, Agama dan Kebudayaan;
- ▢ Artikel ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- ▢ Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

### A. Sistematika Penulisan

1. Judul
2. Nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga, dan email
3. Abstrak
4. Kata kunci
5. Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajianpustaka, literatur review (tulisan terkait)
6. Metodologi
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka menggunakan aplikasi Mendeley atau Zatero
11. Lampiran (jika ada)

### B. Ketentuan Penulisan

1. Judul
  - Judul ditulis dengan huruf kapital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
  - Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti analisis, studi, kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya.

- Judul mencerminkan isi artikel. Jangan menggunakan judul yang sulit dipahami;
  - Judul menggunakan (Bahasa Indonesia)
2. Nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga, dan email
    - Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul.
    - Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “dan” bukan “&”.
  3. Abstrak
    - Abstrak ditulis satu paragraf sebelum isi naskah.
    - Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
    - Abstrak mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan, dan saran atau kontribusi tulisan;
    - Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata
  4. Kata kunci
    - Kata kunci Bahasa Indonesia (4-5 kata)
    - Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (*bold* dan *italic*)
  5. Pendahuluan
    - Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait).
    - Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst. krn. dsb. dan lain sebagainya.
    - Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya.
    - Jangan menggunakan huruf tebal, huruf yang digarisbawahi, atau huruf dengan tanda yang lain.
    - Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan.
    - Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan.
    - Kutipan harus jelas di mana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (,). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan rangkap (“”).
    - Penulisan acuan menggunakan *innote*, contoh Arifuddin Ismail (2014:88) atau (Arifuddin Ismail, 2014: 99).
  6. Metodologi
    - Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penulisan artikel

## 7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interpretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel atau gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
- Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
- Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian *header* dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif.
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi.

Contoh Penyajian Tabel:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Total	Pemeluk Agama				
			Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1	Balikpapan Barat	88,288	83,030	2,549	777	96	1,836
2	Balikpapan Utara	120,265	109,710	7,376	2,046	350	783
3	Balikpapan Timur	63,653	59,419	3,423	669	61	81
4	Balikpapan Tengah	108,513	93,942	11,164	1,716	243	1,448
5	Balikpapan Selatan	215,265	186,212	20,417	5,070	923	2,634
	Jumlah	595,975	532,313	44,929	10,278	1,673	6,782

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2011

Contoh Penyajian Gambar:

Gambar 1. Masjid Shital Mustaqiem



Sumber: Dokumen Masjid Shital Muataqiem Samarinda, 2012

## 8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan

## 9. Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih berisi wujud penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

## 10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel minimal 15 (buku, jurnal nasional dan International). Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi. Kalau tidak ada nama keluarga, nama ditulis seadanya.
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring. Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (,) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring. Jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit.
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)
- Menggunakan aplikasi Mendeley atau Zetero

### Contoh buku:

Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita. Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.

### Contoh artikel:

Budiman, Manneke. 2011. „Ethnicity and the performance of identity“, Wacana 13/2.  
Ricklefs, M.C. 2008. „Religion, Politics and Social Dynamics in Java: Historical and Contemporary Rhymes“, dalam: Greg Fealy dan Sally White (eds) *Expressing Islam. Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

## C. Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan sebanyak 2 rangkap dan *softcopy* berupa file. File bisadikirim melalui link OJS [:Mimikri](#).
- Artikel yang dikirim **wajib** dilampiri biodata ringkas dan surat pernyataan keaslian tulisan.
- Penulis yang menyerahkan artikelnya harus menjamin bahwa naskah yang diajukan tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan atau telah diterima untuk dipublikasi oleh jurnal lainnya.
- Kepastian naskah dimuat atau tidak, akan diberitahukan secara tertulis. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.

**Alamat Jurnal Mimikri:**

**Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Kementerian Agama**

**Jalan A.P.Pettarani No.72 Makassar**

**Kontak Pimpinan Redaksi**

**Nasrun Karami Alboneh : 081355661118/ Nur Saripati Risca: 081244164526**

**E-mail:[mimikrijurnal@gmail.com](mailto:mimikrijurnal@gmail.com)**

Makassar, 17 Januari 2022  
Pemimpin Redaksi

Nasrun Karami Alboneh